O p i n i

Wednesday, 09 September 2009

STRATEGI FROM 5 C TO 5 I
Fonni Helmince*

From 5 C to 5i merupakan salah satu strategi di pengolahan dan pemasaran hasil perikanan Kementrian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang dicanangkan oleh Bapak Prof. Dr. Martani Husaini selaku Direktur Jenderal P2HP dalam acara Rapat Kerja Teknis Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang dilaksanakan di Hotel Sheraton Jogjakarta pada tanggal 1 – 4 Maret 2010. Rapat Kerja Teknis ini diikuti oleh lebih kurang 250 orang yang terdiri dari Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Seluruh Indonesia, Kepala LPPMHP dan Kepala Pelabuhan Perikanan serta Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota.
Tema dalam pertemuan rapat kerja teknis tersebut adalah “Perkuat Industri Pengolahan Produk Perikanan Indonesia dalam rangka memacu ekspor, konsumsi ikan, jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, nilai tambah dan investasi” hal ini menjadi sangat penting untuk dilakssanakan oleh setiap stake holder pengolahan dan pemasaran hasil perikanan seluruh Indonesia guna mendukung capaian misi “Menjadikan Indonesia sebagai Penghasil Produk Kelautan Dan Perikanan Terbesar 2015”
Selanjutnya salah satu strategi yang akan dipergunakan untuk memperkuat industri pengolahan produk perikanan adalah dengan from 5 c to 5 i. Strategi dimaksud adalah :
From 5 C
- Creative to 5 i Increase export market
- Competitive Increase domestic comsumption
- Certified Increase quality and safety
- Cool Chain Sistem Increase value added products
- Commitment Increase invesment

Melalui to be profesional, to be perfect, to be honest and to be prudent. Dengan demikian diharapkan dapat memenuhi target produk olahan, ragam olahan, melalui pemenuhan sapras pengolahan dan pengembangan sentra pengolahan secara nasional. Menyikapi hal tersebut diatas, bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sulawesi Tengah menetapkan target produksi olehan sebesar 36.347 ton pada 2010 dengan target pertambahan pengolah baru sebanyak 550 pengolah, dan 3 ragam produk olahan baru. Kepala Bidang P2HP Ir. Tulak Sapan, M.Si optimis bahwa dengan kerja keras dan dukungan segenap bidang terkait, target ini akan dapat dicapai.

*) penulis adalah kepala seksi Promosi dan Pemasaran Hasil Perikanan di Dislutkan Prov. Sulteng SULAWESI TENGAH MEMILIKI PERAIRAN UMUM DARATAN (DANAU),
Ada apa didalam perairan tersebut????
Oleh : Debby Seke*

Perairan Umum Daratan adalah ekosistem yang memiliki sumberdaya hayati yang sangat beragam. Pemerintah Pusat dalam hal ini Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Departemen kelautan dan Perikanan, bersama Pemerintah Daerah dalam rangka Pengelolaan Sumberdaya Ikan di Perairan Umum Daratan (PUD).
Data dan informasi tentang keragaan Perairan Umum Daratan perekosistem merupakan komponen penting yang dibutuhkan dalam rangka pengelolaan sumberdaya perikanan di PUD.
Beberapa kiat yang telah dilakukan oleh Dinas kelautan Perikanan Prop. Sulawesi Tengah melalui Bidang Perikanan Tangkap yang dikoordinir oleh Ir. Yohanis Riga, M.Si, selaku Kepala Bidang Perikanan Tangkap dan bekerja sama dengan Direktur Sumber Daya Ikan Dirjend Perikanan Tangkap, diantaranya telah dilakukan Identifikasi Perairan Umum Daratan (PUD) di Sulawesi Tengah. Diketahuii Sulawesi Tengah memiliki 13 (tiga belas) buah danau dengan luas perairan dari masing-masing danau bervariasi dan dipandang berpotensi untuk diusahakan antara lain termasuk usaha Perikanan Tangkap. Danau-danau yang dimaksud adalah : Danau Poso, Danau Lindu, DanauTalaga, Danau Tiu, Danau Rano, Danau Wanga, Danau Torire, Danau Tambing, Danau Bolanosau, Danau Tiu, Danau Dako, Dedei dan Danau Laut kecil.
Danau Poso adalah danau yang terletak di kab. Poso, diwilayah Tentena kecamatan Pamona Utara dengan jarak dari kota Palu sekitar 208 km. Danau ini merupakan urutan pertama terluas di Sulawesi Tengah yakni luas perairan diperkirakan 32.150 Ha, dan merupakan urutan ke-3 terbesar di Indonesia, dengan jenis ikan hasil tangkapan antara lain: Ikan Sidat (endemic), ikan mas, nila dan beberapa jenis ikan lainnya. Ikan Sidat adalah ikan yang sangat diminati oleh beberapa negara lain dengan harga pemasaran yang cukup tinggi.
Kabupaten Poso juga memiliki danau yang disebut Danau Wanga dikecamatan Lore Piore. Danau ini memiliki luas perairan sekitar 150 Ha, secara geografis danau ini terletak dalam kawasan Lore Lindu dalam formasi lembah Napu. Aliran air mengalir dan bermuara pada sungai leriang (DAS). Danau ini terletak diatas pegunungan . Selain itu juga mempunyai danau keci lainl yakni Danau Torire dan Danau Tambing dengan luas perairan sekitar 10 – 20 ha, berada diketinggian 1750 dpl.
Jenis alat tangkap yang digunakan oleh masyarakat sekitar Danau Poso adalah kelompok alat Sero yang biasa disebut Wayamasapi, dimana alat ini merupakan alat tangkap yang digunakan secara turun-temurun untuk penangkapan jenis ikan sidat.
Danau lindu merupakan danau yang berada di Kabupaten Sigi, dimana kabupaten ini merupakan kabupaten hasil pemekaran dari kab. Donggala. Danau ini terletak kurang lebih 77 km dari kota Palu. Kondisi menuju lokasi dapat digunakan dengan kendaraan roda 4 dan sampai pada desa Silaunda dilanjutkan dengan kendaraan roda 2/ojek kira-

kira 17 km. danau ini terletak dikecamatan lindu dengan ibu kota kecamatan desa Tomado. Alat tangkap yang digunakan oleh masyarakat dipesisir danau adalah Pancing dan Bubu.
Diwilayah Kecamatan Lambunu Kabupaten Parigi Moutong terdapat beberapa danau antara lain : Danau Bolanosau, Dako, Danau Dedei dan Danau Laut Kecil. Kabupaten Parigi Moutong mempunyai beberapa potensi sumberdaya perairan khususnya bagi pengembangan ekowisata dan perikanan. Danau tersebut belum dimanfaatkan dengan baik, namun didalamnya tersembunyi sumberdaya perikanan maupun untuk kepentingan wisata. Danau Bolanosau berada pada cekungan dibawah kaki Pegunungan Santigi, yang merupakan jalan Trans Sulawesi yang menghubungkan ke Propinsi Gorontalo dan Sulawesi Utara. Lokasi terletak pada ketinggian sekitar 14 km dari permukaan laut dengan luas kurang lebih 75 Ha. (DS) *Penulis adalah Kepala Seksi di Bidang Perikanan Tangkap KESEJAHTERAAN PRIORITAS KABINET SBY-BUDIONO
Oleh Hasanuddin Atjo*

KESEJAHTERAAN rakyat akan menjadi skala prioritas kabinet Indonesia bersatu jilid II, periode 2009 - 2014. Itulah yang menjadi inti pidato presiden terpilih DR. Susilo Bambang Yudhoyono pada saat dilantik sebagai presiden yang ke-6 negara kesatuan Republik Indonesia pada Selasa, 20 Oktober 2009 yang lalu dalam sidang paripurna MPR RI bertempat di gedung MPR/DPR RI. Untuk mewujudkan sasaran itu, maka strategi yang akan dilakukan oleh kabinet Indonesia bersatu adalah melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan kepada keunggulan daya saing, pengelolaan sumberdaya alam dan peningkatan sumberdaya manusia. Implementasi dari program pembangunan ekonomi itu tentunya akan disesuaikan dengan keunggulan komparatif dan kompetitif yang dimiliki oleh masing-masing wilayah di republik tercinta ini.

Sulawesi Tengah
Sulawesi Tengah memiliki panjang garis pantai 4.013 km dengan jumlah pulau kecil 1.020 buah (Verifikasi, 2008), luas wilayah darat sekitar 68.000 km2 dan laut 193.000 km2 atau 35% dari wilayah Sulawesi. Penduduk provinsi ini pada tahun 2005 sekitar 2,5 juta jiwa dengan penduduk kategori miskin kurang lebih 22%. PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) pada tahun 2008 adalah 14,9 trilyun rupiah atau hanya 0,0028 % dari PDB (Produk Domestik Bruto) yang jumlahnya sekitar 5.000 trilyun rupiah. Hampir separuh (kurang lebih 45%) PDRB provinsi Sulawesi Tengah ditopang oleh sektor pertanian (pertanian arti luas termasuk perikanan dan kelautan, serta kehutanan) selebihnya dibagi oleh delapan sektor lainnya. Pada tahun 2004 PDRB Sulawesi Tengah sekitar 10,6 trilyun rupiah dan pada tahun 2009 diperkirakan meningkat menjadi 16 trilyun rupiah, dan ini selama RPJM I (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pertama, 2004 – 2009) PDRB daerah ini meningkat sekitar 60% namun prosentase peningkatan ini masih berada dibawah prosentase peningkatan PDB.

Sasaran kabinet Indonesia Bersatu yang akan mewujudkan kesejahteraan rakyat telah sejalan dengan visi pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah “Terwujudnya Sulawesi Tengah yang Aman dan Sejahtera berlandaskan Iman dan Taqwa”. Karena itu yang perlu menjadi perhatian kita adalah bagaimana menemukan leverage, atau faktor pengungkit itu agar sasaran kesejahteraan rakyat dapat direalisasikan. Orientasi kepada pengembangan industri merupakan sebuah jawaban, hanya saja pertanyaannya adalah pengembangan industri seperti apa yang akan berkesesuaian dengan Sulawesi Tengah. Kadin Indonesia memetakan ada tiga cluster industri unggulan di Indonesia, yaitu pertama cluster unggulan pendorong pertumbuhan ekonomi yang terdiri dari industri makanan dan minuman; industri tekstil dan produk tekstil; industri alas kaki, elektronika dan komponen elektronika; serta industri alat angkut dan komponen otomotif. Kedua, cluster unggulan pendalaman struktur industri yaitu industri alat komunikasi dan informatika, industri logam dasar dan mesin serta petrokimia. Ketiga adalah cluster unggulan sumber penerima devisa yaitu industri pengolahan hasil pertanian, peternakan dan kehutanan; pengolahan hasil laut dan kemaritiman; dan industri berbasis tradisi dan budaya.

Industri Penerima Devisa
Berdasarkan analisis dengan menghubungkan kebijakan prioritas kabinet Indonesia bersatu jilid II dan peta pengembangan industri Indonesia serta kondisi dan realitas Sulawesi Tengah, maka leverage atau faktor pengungkit itu harus diarahkan kepada pengembangan cluster unggulan industri sumber penerima devisa. Mengapa harus kepada industri sumber penerima devisa? Pertama persoalan dunia saat ini dan ke depan diperhadapkan kepada penyediaan pangan, energi terbarukan dan dukungan bahan baku industri manufaktur untuk 6,8 milyar penduduk dunia pada tahun 2008 dan diprediksi menjadi 9,8 milyar pada tahun 2030. Kedua bahwa potensi sumberdaya Sulawesi Tengah sangat berkesesuaian dan belum dimanfaatkan secara optimal, Ketiga berkembangnya cluster industri penerima devisa, antara lain akan mengurangi angka kemiskinan (pro poor), menyerap tenaga kerja (pro job), serta mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah (pro growth). Arah kebijakan ini tidak berarti meninggalkan delapan sektor lainnya, akan tetapi akan didorong secara parallel dan simultan, karena antara satu sektor dengan sektor lainnya saling berkaitan. Berkembangnya industri penerima devisa tentunya membutuhkan dukungan infrastruktur seperti lisrtik, moda transportasi (laut, udara dan darat), jasa dan perdagangan serta keuangan.

Blue Print, Cetak Biru
Kalau disepakati bahwa yang menjadi leverage adalah pengembangan industri penerima devisa, maka tahapan yang harus dilakukan menyusun blue print secara holistik dan komprehensif. Blue print untuk periode 2010 – 2014 dibuat lebih fokus terhadap komoditi tertentu pada masing-masing sektor dan selanjutnya menjadi acuan bagi 11 kabupaten/kota di provinsi ini. Sebagai contoh pada sektor Kelautan dan Perikanan (2010 -2014) secara nasional

memiliki tiga program pokok yaitu peningkatan pendapatan nelayan - pembudidaya ikan - dan pengolah ikan; peningkatan infrastruktur wilayah pesisir; dan penanganan pulau-pulau kecil dan terluar. Selanjutnya secara regional Sulawesi Tengah akan menerapkan pendekatan OVOP, one village one product/commodity antara lain di kawasan teluk Tomini yaitu kabupaten Parigi Moutong fokus kepada pengembangan rumput laut; kabupaten Poso kepada pengembangan ikan sidat (Masappi); kabupaten Tojo Una-Una pengembangan wisata bahari; dan Luwuk Banggai industri perikanan tangkap terpadu. Bila diasumsikan dalam blue print bahwa PDRB daerah ini pada tahun 2014 meningkat menjadi tiga kali lipat dari PDRB tahun 2009 atau dari 16 trilyun rupiah menjadi 48 trilyun rupiah, kemudian pertumbuhan ekonomi diatas 7 persen (sama dengan target nasional) dan tingkat inflasi dapat ditekan seminim mungkin, maka yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana strategi untuk merealisasikan target itu. Paling tidak ada tiga skenario yang harus dibangun guna menjawab pertanyaan itu, yaitu skenario meningkatkan investasi ke daerah ini; mengembangkan inovasi; dan perubahan mindset stakeholders. Dari tiga skenario itu, maka perubahan mindset menjadi faktor kunci. Sukamdani, dalam Suara Pembaharuan 4 November 2008 mengemukakan bahwa mindset stakeholders merupakan bagian terpenting terhadap masuknya investasi dan berkembangnya inovasi dalam satu wilayah. Sebuah wilayah akan menjadi maju dan sejahtera apabila memiliki tiga syarat yaitu: (a) terciptanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa, (b) memiliki sejumlah wirausahawan yang berdidikasi dan pengabdian yang tinggi, (c) memiliki sejumlah ilmuan yang menyumbangkan hasil penelitiannya sebagai komoditas yang berharga di pasar global. Semoga

*) DR. Ir. Hasanuddin Atjo MP, Kadis Kelautan dan Perikanan Sulteng

REFLEKSI KONGRES KELAUTAN MANILA 2009

Oleh Hasanuddin Atjo*

KONGRES kelautan Asia Timur ke 3, the 3rd East Asia Seas Congress baru saja diselenggarakan dengan sukses dari tanggal 23 – 27 November 2009 di PICC (Philipina International Convetion Center), Manila. Kongres ini antara lain bertujuan bagaimana membangun ekonomi di wilayah pesisir dengan dampak terhadap lautan dan pesisir seminal mungkin agar berkelanjutan. Peserta kongres sekitar 1.500 orang yang berasal dari Pemerintah dan non Pemerintah dari sejumlah negara yang tergabung di kawasan Asia Timur. Delegasi dari kawasan timur Indonesia diwakili oleh provinsi dan kabupaten se teluk Tomini, Tomini bay yaitu Provinsi Sulawesi Tengah, Gorontalo dan Sulawesi Utara yang difasilitasi oleh SUSCLAM, sebuah NGO Internasional bekerjasama dengan Kementrian Lingkungan Hidup Republik Indonesia.

Bekaitan dengan tujuan itu, maka materi yang didiskusikan pada kongres tersebut antara lain (1) Konservasi dan pengembangan terumbu karang, mangrove serta padang lamun dalam rangka mempertahankan biodiversity (keragaman species) dan peningkatan produktifitas, (2) Pengembangan energi terbarukan, khusunya energi listrik dalam rangka mengurangi emisi C02 seperti pemanfaatan tenaga surya, mikro hidro, biofuell, wind (angin), tidal current (arus laut), tidal power (pasang-surut air laut), geothermal (panas bumi), dan biogas, (3) Pemanfaatan wialayah pesisir utamanya pengelolaan teluk dan pulau-pulau kecil kaitannya dengan permasalahan koordinasi, komitmen dan konsistensi antar sektor, antar pusat dan daerah serta antar stakeholders.

Bagaimana Sulawesi Tengah

Tingkat kerusakan terumbu karang, mangrove maupun padang lamun di Sulawesi Tengah cukup tinggi, diperkirakan telah mencapai angka 40 – 50 persen antara lain akibat dari penangkapan ikan secara ilegall (penggunaan bahan kimia, alat tangkap yang tidak sesuai, penggunahan bahan peledak dan bahan kimia lainnya), pengambilan batu karang untuk material bangunan dan bambu laut; konversi mangrove dan kawasan pesisir untuk aktifitas ekonomi. Di satu sisi Republik ini sudah memiliki perangkat hukum berupa undang-undang, peraturan pemerintah, perda, pergub maupun perbub untuk meminimalkan kerusakan lingkungan pesisir dan lautan, namun pada sisi lain, penegakan hukum belum dapat dilaksanakan secara baik. Realitas ini lebih banyak disebabkan oleh hambatan rendahnya tingkat kesejahteraan dan pemahaman masyarakat di wilayah pesisir. Berkaitan dengan masalah kesejahteraan masyarakat pesisir, berbagai program telah dilakukan namun upaya ini masih cenderung parsial dan belum bersifat integrasi antar sektor, sebut saja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam beberapa tahun terakhir telah dilakukan integrasi antara program pemberdayaan (pengembangan rumput laut, bantuan mesin katinting dan rumpon bagi nelayan kecil); program konservasi berupa pembuatan fish home, rumah ikan dan terumbu karang buatan; serta program pengawasan sumberdaya Kelautan dan Perikanan.

Hasil perhitungan ilmiah menunjukkan bahwa emisi C02 yang berdampak terhadap efek rumah kaca (dampak global worming) dominan berasal dari pembakaran energi fosil (minyak, gas dan batubara) yang dipergunakan oleh pabrik-pabrik, kendaraan bermotor dan pembangkit tenaga listrik. Berkaitan dengan upaya mengurangi emisi itu, maka saat ini beberapa negara di Asia Timur seperti Korea Selatan, Jepang dan China sudah menggunakan dan terus mengembangkan energi terbarukan seperti energi angin, pasang-surut laut, arus laut maupun arus sungai, biofuell, panas bumi dan biogass. Relevansi dengan itu pengembangan energi terbarukan di Sulawesi Tengah juga telah dilakukan diantaranya adalah pengembangan mikrohidro, listrik tenaga angin sekala kecil dan gas metana dari pembakaran sampah namun pengembangan ini terutama tenaga angin dan gas metana masih perlu dilakukan penyempurnaan-penyempurnaan.

Teluk dan pulau kecil merupakan sebuah potensi yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan ekonomi sebuah wilayah. Sebagai contoh beberapa teluk di Korea Selatan telah dimafaatkan untuk pengembangan ekonomi yang dilakukan secara terintegrasi dan mempunyai dampak yang signifikan terhadap ekonomi wilayah. Di Sulawesi Tengah terdapat tiga zona pengembangan ekonomi di wilayah Laut dan Pesisir yaitu Selat Makassar laut Sulawesi, Teluk Tomini dan Teluk Tolo. Selain itu juga memiliki pulau kecil sejumlah 1.020 buah dengan tiga buah pulau terluar yang berbatasan

dengan Malaysia. Pengelolaan zona ekonomi wilayah laut dan pesisir masih dilakukan secara parsial dan belum tercipta integrasi program antar sektor dan antar wilayah, masih ada kesan bahwa kelautan dan perikanan merupakan tugas sektor tetentu. Kondisi ini antara lain disebabkan oleh paradigma pembangunan yang masih orientasi ke darat sehingga untuk ke laut menimbulkan dampak terhadap lemahnya koordinasi, komitmen dan konsistensi program antar sektor, antar wilayah dan antar stakeholders

Rekomendasi
Dari uraian yang telah dikemukakan, maka paling tidak ada dua rekomendasi yang dikemukakan untuk menjadi bahan pertimbangan kita, diantaranya: Pertama, agar potensi laut dan pesisir dapat memberikan manfaat ekonomi sebesar-besarnya dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan, maka pendekatan pengelolaan harus dilakukan secara terintegrasi agar fungsi koordinasi, komitmen dan konsistensi dapat dimaksimalkan. Berkaitan dengan itu pengelolaan wilayah pesisir dan laut baik antar provinsi maupun antar kabupaten/kota harus diawali dengan proses penyusunan grand scenario untuk menjadi acuan bagi provinsi maupun kabupaten/kota. Pemerintah pusat dalam hal ini mempunyai tupoksi memfasilitasi penyusunan grand scenario lintas provinsi (misalnya teluk Tomini) dan pemerintah provinsi akan memfasilitasi penyusunan grand scenario lintas kabupaten/kota (misalnya teluk Palu). Pengelolaan Manila bay (teluk Manila) dapat dijadikan salah saru referensi dalam menyusun grand scenario itu. Teluk Manila merupakan wilayah dari empat provinsi di Philipina dan grand scenario-nya disusun selama kurun waktu 2005-2009 dengan rencana implementasi 2010 – 2015. Inti dari grand scenario ini adalah bagaimana membangun industri Kelautan dan Pesisir di Manila bay mempunyai dampak minimal terhadap lingkungan. Untuk itu pendekatan yang dipergunakan adalah integrasi sektor (pusat-provinsi-kabupaten/kota) dan integrasi stakeholders (pemerintah-masyarakat-pengusaha).
Kedua, realitas menunjukkan bahwa program desa atau kelurahan mandiri yang berada di pesisir ataupun di dataran tinggi secara umum belum memberikan hasil yang signifikan terhadap kesejahteraan rakyat yang merupakan salah satu ukuran desa atau kelurahan mandiri, hal ini antara lain disebabkan rancangan program yang dilkukan cenderung masih parsial belum terintegrasi. Berkaitan dengan itu rancangan sebuah desa atau kelurahan mandiri harus dilakukan terintegrasi antar sektor dan antar stakeholders. Ketersediaan air yang cukup dan kemungkinan membangun pembangkit listrik tenaga mikro serta ketersedian lahan menjadi prasyarat dasar untuk suksesnya program desa atau kelurahan mandiri. Penyediaan tenaga listrik mikro dapat berasal dari tenaga air atau biogass yang berasal dari kotoran ternak sapi atau kerbau yang dikandangkan. Dengan tersedianya air dan listrik murah, maka pengembangan produksi pangan serta diversifikasi vertikal maupun horizontal dapat dilakukan. Bahkan tidak menutup kemungkinan dengan tersedianya listrik murah juga akan mendorong berkembangnya industri pengolahan sekala kecil seperti kerajinan rotan dan kayu termasuk kayu kelapa dan ebony, pengolahan makanan dan minuman dari rumput laut, air kelapa dan bahkan buah anggur kalau budidayanya dikembangkan kembali. Berkaitan dengan implemetasi program desa atau kelurahan mandiri sudah perlu menjadi pertimbangan bahwa kepala kelurahan atau kepala desa seyogianya memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dengan program unggulan desa atau kelurahan tersebut.
Akhirnya adanya model atau contoh dari dua rekomendasi yang telah disampaikan merupakan salah satu metoda yang efisien dan efektif untuk ditiru oleh desa maupun kelurahan lainnya. Semoga.

*) penulis adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulteng

MEMPERINGATI HARI NUSANTARA TINGKAT PROPINSI SULAWESI TENGAH
Oleh : Muhlis Lamboka *)

Deklarasi Djoeanda

Dengan semangat kebangsaan yang tinggi dan tekat yang bulat memperjuangkan kedaulatan Indonesia maka tanggal 13 Desember 1957, Perdana Menteri Ir. Djoeanda, mendeklarasikan kepada dunia bahwa laut Indonesia adalah termasuk laut di sekitar, di antara, dan di dalam Kepulauan Indonesia, yang dikenal sebagai “Deklarasi Djoeanda”. Deklarasi dengan prinsip-prinsip negara Nusantara (Archipelagic State) ini meskipun mendapat tantangan dari beberapa negara besar seperti Amerika dan Australia, melalui perjuangan panjang, akhirnya pada tahun 1982 lahirlah Konvensi ketiga PBB tentang Hukum Laut (United Nations Convention on the Law of the Sea, disingkat UNCLOS) yang mengakui konsep negara kepulauan, sekaligus juga mengakui konsep Zone Economic Exclusive (ZEE).

Sebagaimana kita maklumi bersama, bahwa seandainya tidak ada “ Deklarasi Djoeanda “, yang diumumkan pada tanggal 13 Desember 1957, maka potensi kekayaan laut Indonesia barangkali hanya sepertiga dari potensi yang kita miliki sekarang. Hal ini disebabkan karena wilayah laut Indonesia pada saat itu hanya meliputi laut sejauh tiga mil dari garis pantai pulau-pulau kita. Lebih jauh dari itu, diantara pulau-pulau Indonesia pun terdapat laut International, yang memisahkan satu pulau dengan lainnya, memisahkan kita, dan ini berarti ancaman bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Dengan Deklarasi Djoeanda tersebut maka Indonesia sebagai negara kepulauan nusantara mempunyai laut seluas 5,8 juta kilometer persegi yang merupakan tiga per empat dari keseluruhan wilayah Indonesia, memiliki garis pantai 81.000 kilometer terpanjang kedua di dunia setelah Kanada, serta memiliki pulau 17.508 buah dengan segala kandungan kekayaannya yang sangat besar sehingga patut disyukuri dan dikelola sebaik-baiknya oleh segenap bangsa Indonesia.

Pada hakekatnya Deklarasi Djoeanda mengandung filosofi yang sangat mendasar yaitu pengakuan wilayah untuk

memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Disamping itu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari 33 Propinsi dan 440 Kabupaten/Kota, memiliki kekayaan sumberdaya laut yang sangat besar sebagai Aset Nasional, maka sangat wajar apabila Pemerintah memberikan perhatian khusus di bidang kelautan. Namun tidak dipungkiri bahwa kekayaan laut yang sedemikian besar terkandung dalam laut kepulauan Nusantara, ternyata di satu sisi belum dikelola secara optimal guna meningkatkan kesejahteraan rakyat dan di sisi lain kondisi laut Indonesia mengalami penurunan kualitas, karena maraknya kegiatan yang berdampak negatif terhadap kondisi laut seperti Ilegal Fishing, pengrusakan terumbu karang dan pencemaran lingkungan. Oleh karena itu yang menjadi tantangan bagi Bangsa Indonesia di masa mendatang, bagaimana kekayaan yang sangat besar tersebut dapat dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan, dan kerusakan yang terjadi di wilayah laut dapat diperbaiki dan dipulih“kan. Untuk itu Pemerintah sangat membutuhkan dukungan dari semua pihak, baik Pemerintah, Swasta maupun masyarakat. Cuplikan dari Deklarasi Djoeanda “segala perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang termasuk daratan Negara Republik Indonesia, dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar daripada wilayah daratan Negara Republik Indonesia dan dengan demikian merupakan bagian daripada perairan nasional yang berada dibawah kedaulatan mutlak daripada Negara Republik Indonesia. Lalu-lintas yang damai di perairan pedalaman ini bagi kapal-kapal asing dijamin selama dan sekedar tidak bertentangan dengan/menganggu kedaulatan dan keselamatan negara Indonesia”.

Hari Nusantara
Bertolak dari Deklarasi Djoeanda tanggal 13 Desember 1957, maka pada 18 Desember 1996 di Makassar - Sulawesi Selatan, BJ Habibie sebagai Menristek membacakan pidato Presiden RI yang dikenal dengan pembangunan “Benua Maritim Indonesia”.
Selanjutnya pada tahun 1998 Presiden BJ Habibie mendeklarasikan visi pembangunan kelautan Indonesia dalam “Deklarasi Bunaken”. Inti dari deklarasi tersebut adalah laut merupakan peluang, tantangan dan harapan untuk masa depan persatuan, kesatuan dan pembangunan bangsa Indonesia.
Selanjutnya, sejak tahun 1999 Presiden Abdurrahman Wahid menyatakan komitmennya terhadap pembangunan kelautan. Komitmen pembangunan pemerintah di bidang kelautan, diwujudkan dengan dibentuknya Departemen Eksplorasi Laut pada tanggal 26 Oktober 1999 dan menempatkan nama Sarwono Kusumaatmadja sebagai menteri pertama.
Keputusan bersejarah dan monumental dari Gus Dur terus berproses menuju kesempurnaan. Pada bulan Desember tahun itu juga nama departemen ini berubah men-jadi Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan, dan sejak awal tahun 2001 berubah lagi menjadi Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) hingga sekarang ini.
Demi menggemakan semangat pembangunan nasional yang berbasiskan kelautan, Presiden KH Abdurrahman Wahid lantas mencanangkan 13 Desember sebagai Hari Nusantara dan memperingatinya untuk pertama kali di Istana Negara, Jakarta tahun 1999.
Visi pembangunan kelautan Gus Dur kemudian diteruskan oleh Presiden Megawati Soe-karnoputri, dengan menetapkan 13 Desember sebagai Hari Nusantara berdasarkan Kep-pres No. 126 Tahun 2001 tentang Hari Nusantara, dan menjadikan tanggal tersebut sebagai hari resmi perayaan nasional.
Guna mencapai visi membangun Indonesia yang berbasiskan pembangunan kelautan, dibentuklah Dewan Kelautan Indonesia (Dekin) berdasarkan Keppres No. 21/2007 tentang Dewan Kelautan Indonesia, terbit 21 September 2007.
Pembentukan Dekin merupakan penyempurnaan lembaga lama Dewan Maritim Indonesia (DMI), yang dibentuk berdasarkan Keppres No. 161 Tahun 1999 tentang Dewan Maritim Indonesia. Dekin yang dipimpin langsung oleh Presiden RI, dengan Ketua Harian Menteri Kelautan dan Perikanan ex officio.
Tugas pokok Dekin adalah memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam penetapan kebijakan umum di bidang kelautan dan merupakan forum konsultasi bagi penetapan kebijakan umum di bidang kelautan.
Visi Kelautan Indonesia adalah Potensi laut dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya merupakan Prime Mover kekuatan bangsa untuk mempersatukan ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang harus dikuasai, dikendalikan dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan dan kedaulatan bangsa.
Dekin beranggotakan Presiden, 12 Kementerian (Menteri Kelautan dan Perikanan RI Ketua Harian Merangkap Anggota, Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Luar Negeri RI, Menteri Pertahanan RI, Menteri Perhubungan RI, Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral RI, Menteri Keuangan RI, Menteri Pendidikan Nasional RI, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata RI, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas RI, Menteri Negara Lingkungan Hidup RI, Menteri Negara Riset dan Teknologi RI), Kepala Kepolisian RI, Kepala Staf TNI Angkatan Laut RI, Tim Pakar, Wakil Perguruan Tinggi, Wakil Asosiasi Dunia Usaha, dan Wakil Lembaga Swadaya Masyarakat. Dekin sehari-hari dikendalikan secara ex officio oleh Staf Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Ekologi dan Sumber daya Laut, kali ini dipimpin oleh Prof. Dr. Ir. Rizald Max Rompas, M.Agr.
Peringatan Hari Nusantara
Latar belakang Peringatan Hari Nusantara adalah dalam rangka menggugah dan mempertebal kembali semangat kebangsaan serta tekat bulat dalam memperjuangkan wilayah perairan laut Indonesia sebagai satu kesatuan yang telah dilakukan oleh para pendahulu dan diprakarsai oleh Perdana Menteri Ir. Djoeanda Kartawidjaja.
Tema Peringatan adalah ”Laut Sebagai Ruang Hidup dan Ruang Juang Bangsa Indonesia Untuk Kesejahteraan Rakyat”,diharapkan dapat menjadi landasan bagi pembangunan kelautan Indonesia yang seimbang antara pembangunan matra darat (land based development) dan pembangunan matra laut (ocean based development) sesuai dengan amanat Presiden RI yang disampaikan Menko Kesejahteraan Rakyat. Oleh sebab itu melalui momentum peringatan Hari Nusantara dapat dijadikan sarana untuk memberikan kesadaran dan pemahaman bagi masyarakat

tentang pentingnya pengobaran semangat kenusantaraan. Acara puncak Peringatan Hari Nusantara Ke Sepuluh Tahun 2009 Tingkat Nasional dilaksanakan di Centerpoint of Indonesia, Pantai Losari- Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan, dan dihadiri oleh Menko Kesejahteraan Rakyat, Agung Laksono bersama Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Fadel Muhammad

Peringatan Hari Nusantara Tingkat Propinsi Sulawesi Tengah
Peringatan Hari Nusantara Ke Sepuluh Tahun 2009 Tingkat Propinsi Sulawersi Tengah akan dilaksanakan hari Kamis tanggal 17 Desember 2009 direncanakan Gubernur Sulawesi Tengah Bapak HB Paliudju akan bertindak sebagai Inspekur Upacara sekaligus akan membacakan Sambutan Menteri Kelauatan dan Perikann Republik Indonesia Selaku Ketua Umum Panitia Nasional Peringatan Hari Nusantara Ke Sepuluh Tahun 2009, bertempat di halaman kantor Gubernur Sulawesi Tengah.
Peringatan Hari Nusantara Tingkat Propinsi telah dilaksanakan sebanyak delapan kali berturut-turut masing-masing (1) Hari Nusantara Kedua Tahun 2001, dilaksanakan di halaman depan kantor Gubernur Sulawesi Tengah, (2) Hari Nusantara Ketiga Tahun 2002 dengan tema ” Dengan Semangat Maritim Kita Bangun Daerah Demi Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia ”, dilaksanakan di PPI Paranggi Kabupaten Parigi Moutong, (3) Hari Nusantara Keempat Tahun 2003 dengan tema ” Daya Gunakan Potensi Ekonomi Maritim Untuk Kesejahteraan dan Kejayaan Bangsa Indonesia ”, dilaksanakan di UPMP Mamboro Kota Palu, (4) Hari Nusantara Ke Lima Tahun 2004 dengan tema ” Melalui Transformasi Budaya Kita Bangun Bangsa Bahari Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia ”, dilaksanakan di Pantai Talise Kota Palu, (5) Hari Nusantara Ke Enam Tahun 2005 dengan tema ” Dengan Semangat NKRI Kita Wujudkan Pembangunan Indonesia Berbasis Negara Kepulauan ”, dilaksanakan di Pantai Talise Kota Palu, (6) Hari Nusantara Ke Tujuh Tahun 2006 dengan tema ”Perteguh NKRI Sebagai Negara Nusantara Untuk Tingkatkan Daya Saing Bangsa ”, dilaksanakan di Pantai Talise Kota Palu, (7) Hari Nusantara Ke Delapan Tahun 2007 dengan tema ” Tahun Emas Deklarasi Djoeanda”, dilaksanakan di PPI Donggala Kabupaten Donggala, (8) Hari Nusantara Ke Sembilan Tahun 2008 dengan tema ” 100 Tahun Kebangkitan Nasional (1908 – 2008)” dilaksanakan di halaman depan kantor Gubernur Sulawesi Tengah.
Dalam memeriahkan setiap peringatan tersebut telah dilaksanakan berbagai kegiatan antara lain lomba mancing, lomba gemar makan ikan, lomba perahu layar dan dayung tradisional, gerakan bersih pantai dan laut. Untuk tahun 2009 telah dilaksanakan Gerakan Cinta Bahari dengan kegiatan lomba mewarnai bagi anak-anak umur 4 – 7 tahun, lomba menggambar anak umur 8 – 10 tahun dan karya ilmiah bagi pelajar Sekolah Menengah Pertama, dengan tema ”Terumbu Karang Sehat, Ikan Melimpah Nelayan Sejahtera”, yang hadiah pemenangnya akan diserahkan pada puncak upacara hari Nusantara di halaman kantor Gubernur Sulawesi Tengah pada tanggal 17 Desember 2009.
Peringatan Hari Nusantara pertama tahun 2000 belum dilaksanakan di daerah, perayaannya masih terbatas pada tingkat pusat (Jakarta).

Dirgahayu Nusantara, Jaya Indonesiaku.
*) Penulis adalah Kepala Bidang Kelautan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah

SINERGI DI HARI NUSANTARA
*Muhlizar

Salah satu perjuangan diplomasi bangsa Indonesia ditingkat dunia dalam rangka mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa yang utuh pertama kali dicetuskan 13 Desember 1957. Momen yang diabadikan sebagai Deklarasi Djoeanda itu mendasari perjuangan Indonesia untuk menjadi negara kepulauan (Archipelagic State). Pemerintah Indonesia dibawah kepemimpinan seorang Presiden yang berjiwa Nasional yang sangat tinggi yaitu Ir. Soekarno serta seorang Perdana Menteri Ir. H. Djoeanda menyatakan kepada dunia bahwa perairan laut teritorial Indonesia merupakan wilayah yang tak terpisahkan dari wilayah daratan.

Perjuangan tersebut tidak berjalan mulus dan berlangsung selama 25 tahun karena keberadaan Negara-negara daratan sangat tidak menerima konsep Negara kepulauan. Tapi, perjuangan ini sangat didukung oleh Negara-negara yang mempunyai pulau yang banyak, dan puncaknya adalah ditetapkan dan diterima dalam Konvensi Hukum Laut Internasional (United Nation Convention on the Low of the Sea (UNCLOS) 10 Desember 1982.

Untuk mengingat momentum ini, maka Pemerintah Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 126 tahun 2001 diperingati sebagai Hari Nusantara, tepatnya pada 13 Desember. Mida Saragih, (Bisnis Indonesia online, 14 Desember 2009) menyatakan bahwa Peringatan hari Nusantara ini merupakan momen yang tepat bagi 238 juta jiwa rakyat Indonesia untuk merefleksikan tata interaksi antara laut dan manusia.

Wilayah perairan laut bukan hanya merupakan kewenangan dari Departemen Kelautan dan Perikanan saja, tapi merupakan suatu wilayah multy exploiting, dimana terdiri dari banyak Departemen dan Kementerian. Meskipun demikian diharapkan bahwa pelaksanaan pemanfaatan oleh masing-masing pengambil kebijakan di Departemen/Kementerian tidak menjadikan semakin mis koordinasi, tapi menjadi semakin banyak yang mengurus perairan laut secara sinergi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan.

Sesuai dengan tema Peringatan Hari Nusantara tahun 2009 adalah "Laut Sebagai Ruang Hidup dan Ruang Juang

Bangsa Indonesia Untuk Kesejahteraan Rakyat". Hal ini merupakan pengejawantahan dari keinginan bangsa Indonesia sebagai salah satu Negara kepulauan yang terbesar dan terkuat didunia dengan jumlah penduduk yang mendiami wilayah pesisir ± 16,42 juta jiwa yang tersebar di 10.666 desa pesisir diseluruh nusantara. Yang lebih penting juga adalah merubah mindset laut sebagai tempat pembuangan sampah menjadi bahwa laut merupakan habitat yang sebenarnya dan masa depan bangsa.

Hari Nusantara yang diperingati setiap tanggal 13 Desember dapat dijadikan sebagai titik tolak dimulainya pembangunan sektor kelautan dan perikanan sebagai penggerak utama pembangunan nasional. Pemikiran yang visioner dari Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad menyampaikan bahwa Kemeterian Kelautan dan Perikanan telah menetapkan Visi "Indonesia sebagai negara penghasil produk kelautan dan perikanan terbesar tahun 2015" dan Misi “Mensejahterakan Masyarakat Kelautan dan Perikanan”. Jadi selama lima tahun kedepan semua program kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan fokus kepada mendorong peningkatan produksi dengan tujuan meningkatkan pendapatan nelayan dan petani ikan yang bermuara kepada peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat kelautan dan perikanan.

Dalam proses pembangunan tersebut, yang perlu di ingat bahwa pembangunan kelautan dan perikanan yang berlangsung tidak harus menjadikan nelayan menjadi tergusur dari laut sebagai ruang hidupnya. Sejumlah kebijakan dan peraturan yang berdampak buruk dan tidak berpihak kepada nelayan kecil harus di tinjau kembali dengan tujuan untuk mengangkat harkat dan martabat nelayan.

Akhirmya, semoga dengan adanya peringatan Hari Nusantara setiap tahunnya bukan hanya merupakan seremoni semata, tapi dijadikan semangat dalam mengelola dan memanfaatkan potensi kelautan dan perikanan bersama-sama secara sinergi untuk kepentingan masyarakat nelayan.

*) Penulis adalah Staf pada Bidang P2HP Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

PNPM MANDIRI-KP, HARAPAN NELAYAN DAN PETANI IKAN MISKIN

Muhlizar*

Mengawali tahun 2009 yang masih didera dengan persoalan krisis global, pemerintah melalui Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) membuat suatu gebrakan untuk mengatasi kejatuhan lebih dalam lagi dari masyarakat miskin kejurang kemiskinan dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri-Kelautan dan Perikanan (PNPM Mandiri-KP). Program ini merupakan awal proses integrasi program-program pemberdayaan di lingkup Departemen Kelautan dan Perikanan.

Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, sebelumnya telah banyak melaksanakan program-program serupa yang merupakan program yang diperuntukkan bagi pengurangan kemiskinan masyarakat kelautan dan perikanan diantaranya adalah Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP), Dana Penguatan Modal (DPM), Optimalisasi Usaha, Klasterisasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dan bantuan-bantuan lainnya.

Menteri Kelautan dan Perikanan Fredy Numberi dalam acara Lounching Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri-Kelautan dan Perikanan (PNPM Mandiri-KP) pada tanggal 17 Maret 2009 di Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana disampaikan dalam siaran pers dari pusat data, statistik dan informasi DKP pada tanggal 19 Maret 2009 bahwa dana yang diperuntukkan program ini berjumlah Rp. 116 milyar bagi 120 kabupaten/kota diseluruh Indonesia. Lebih lanjut diuraikan bahwa kegiatan-kegiatan pokok PNPM Mandiri Kelautan dan Perikanan sebagai berikut : 1). perencanaan pembangunan wilayah dan sumberdaya kelautan dan perikanan berbasis desa 2). pembangunan infrastruktur desa dan lingkungan 3). peguatan kapasitas sumberdaya manusia, kelembagaan dan aparat. 4). pemberdayaan masyarakat.

Adapun kegiatan dalam PNPM Mandiri-KP akan dilaksanakan melalui mekanisme Tugas Pembantuan (TP) mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2008. Lokasi penerima harus memenuhi kriteria dengan prioritas sasaran desa miskin. PNPM Mandiri-KP diarahkan untuk memanfaatkan secara optimal kelembagaan masyarakat yang terbentuk melalui beberapa program sebelumnya, antara lain Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan), Kelompok Usaha Bersama (KUB) Nelayan, Lembaga Ekonomi Pengembangan Pesisir Mikro Mitra Mina (LEPP-M3), kelompok pengolah dan pemasar, kelompok pengolahan hasil perikanan, serta Kelompok Masyarakat Pemanfaat (KMP).

Satu hal yang patut pula diperhatikan bahwa lounching program ini dilaksanakan pada saat sebelum Pemilu Legislatif, jangan sampai program yang baik ini hanya dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu untuk kepentingan politik semata. Mudah-mudahan PNPM Mandiri-KP ini bukan merupakan program yang sengaja dibuat untuk kepentingan politik, tapi memang betul-betul untuk kepentingan pengentasan kemiskinan nelayan dan petani ikan.

Disamping hal tersebut diatas kekhawatiran juga kembali muncul, bahwa sasaran program pemberdayaan adalah desa miskin yang didiami oleh nelayan/petani ikan dan kelompok-kelompok yang sudah ada sebelumnya yang notabene telah

banyak menerima bantuan dari pemerintah.

Pertanyannya, jika PNPM Mandiri-KP ini hanya ditujukan untuk kelompok-kelompok yang sudah ada, bagaimana dengan nelayan/petani ikan miskin ataupun nelayan buruh yang selama ini tidak atau belum tertampung kedalam kelompok-kelompok yang sudah pernah dibentuk ?. Dan, jika yang diberikan adalah kelompok-kelompok yang sudah ada, maka bantuan ini akan bertumpuk pada kelompok-kelompok masyarakat tertentu, dan ini akan berpotensi menyebabkan kecemburuan sosial dikalangan masyarakat nelayan/petani ikan miskin.

Kegiatan dalam PNPM Mandiri-KP dilaksanakan melalui mekanisme Tugas Pembantuan (TP) , yang bertumpu pada pemerintah daerah kabupaten/kota. Tugas ini tidaklah ringan, dan kesuksesan program PNPM Mandiri-KP sangat-sangat banyak akan di pengaruhi oleh kesiapan dan kesigapan pemerintah daerah (Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota). Jika sasaran program ini adalah kelompok yang sudah ada, maka tidak terlalu sulit untuk mendata kembali. Akan tetapi kelompok yang sudah ada inipun harus di identifikasi kembali untuk memilah, mungkin diantara kelompok ini sudah tidak layak lagi untuk dibantu karena sudah tidak miskin lagi ataupun bantuan yang pernah diberikan oleh pemerintah masih sementara digulirkan dalam kelompok.

Perlu diperhatikan, jika program ini diarahkan untuk mengentaskan kemiskinan masyarakat nelayan/petani ikan, maka sebaiknya sasaran dari PNPM Mandiri-KP diarahkan kepada masyarakat nelayan/petani ikan miskin yang belum pernah tersentuh oleh bantuan. Jika tidak, maka yang terjadi adalah amal (charity), atau proyek (program yang diobyekkan), yang tidak mampu memberdayakan, tetapi justru dapat memperdayai masyarakat nelayan/petani ikan.

Ilustrasinya, dilihat dari jumlah dana yang sebesar Rp. 116 milyar jika dibagi secara merata kepada 120 kabupaten/kota seluruh Indonesia akan memperoleh masing-masing sebesar Rp. 0,967 milyar saja, dan dalam satu kabupaten/kota ada 20 kelompok, maka masing-masing kelompok akan memperoleh Rp. 48.350.000,-, dan jika dalam satu kelompok terdapat 20 orang anggota, maka masing-masing anggota kelompok hanya memperoleh dana Rp. 2.417.500,-. Dana yang berjumlah Rp. 2.417.500,- jika diberikan kepada satu rumah tangga miskin tidak akan cukup untuk membeli perahu lengkap dengan mesin dan alat tangkap ataupun untuk membiayai faktor produksi kolam/tambak, mungkin dana tersebut hanya akan dibelanjakan untuk kebutuhan sehari-hari atau untuk membayar utang saja yang pada akhirnya sasaran program tidak tercapai.

Idealnya, bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota menetapkan sasaran masyarakat nelayan/petani ikan yang benar-benar miskin dan membutuhkan bantuan serta belum pernah memperoleh bantuan dari pihak manapun. Dengan dana Rp. 0,967 milyar per kabupaten/kota tersebut jika dibagikan kepada 5 kelompok yang benar-benar miskin, maka setiap kelompok akan memperoleh dana sebasar Rp. 193.400.000,- dan jika dibagikan kepada 20 orang anggota, maka setiap anggota akan memperoleh Rp. 9.670.000. Misalnya dana tersebut diperuntukan bagi nelayan yang menangkap ikan teri, maka dari dana itu sudah cukup untuk memperoleh 1 unit perahu, 1 unit mesin katinting, 1 unit mesin generator dan lampu serta alat tangkap sero. Dengan demikian maka setiap kabupaten/kota akan mengentaskan masyarakat nelayan/petani ikan dari kemiskinan sebanyak 100 rumah tangga, dan jika dikalikan dengan jumlah 120 kabupaten/kota, maka masyarakat nelayan/petani ikan di Indonesia yang terentaskan dari kemiskinan pada tahun 2009 berjumlah 12.000 rumah tangga. Jadi, dengan jumlah dana yang dikucurkan sebesar Rp. 116 milyar melalui PNPM Mandiri-KP akan dapat mengurangi penduduk miskin di Indonesia sebanyak 12.000 rumah tangga.

Dibandingkan memberikan dana kepada 20 kelompok yang sudah ada yang hanya sebesar Rp. 2.417.500/orang dengan sasaran semua kelompok dapat, akan lebih bermanfaat jika diberikan kepada 5 kelompok masyarakat nelayan/petani ikan yang benar-benar membutuhkan bantuan dari pemerintah untuk keluar dari jerat kemiskinan.

Mengidentifikasi kelompok yang benar-benar miskin dan sangat membutuhkan bantuan berjumlah 5 kelompok, bagi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota tidaklah sulit, dengan harapan bahwa PNPM Mandiri-KP betul-betul tepat sasaran yaitu mengentaskan kemiskinan masyarakat nelayan/petani ikan dengan memberdayakannya. PNPM Mandir-KP hanya salah satu dari berbagai macam program pemerintah untuk membantu masyarakat miskin untuk memperoleh pendapatan. Selain itu, program lain yang sangat membantu masyarakat miskin adalah Asuransi Kesehatan Masyarakat Miskin (Askeskin), Beras Miskin (Raskin) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) serta Biaya Operasional Sekolah (BOS). Dan jika semua program ini berjalan sesuai dengan perencanaan, maka kemiskinan masyarakat nelayan/petani ikan di Indonesia akan lebih cepat terentaskan.
Keberhasilan PNPM Mandiri-KP akan sangat bergantung dukungan dan kontribusi pemerintah dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia dalam bentuk kebijakan-kebijakan, peraturan dan perencanaan yang tepat serta pendanaan.
Pengukuran Keberhasilan Program
Untuk melihat keberhasilan program-program yang telah digulirkan dan akan digulirkan diperlukan monitoring dan evaluasi (Monev) terhadap program tesebut. Pada saat sekarang ini bahwa evaluasi dan monitoring pelaksanaan program-program pengentasan kemisikinan pada kelompok-kelompok selalu diukur dengan non kuantitatif yaitu baik, sedang, kurang dan sebagainya (Mubyarto, 2003). Mungkin pengukuran keberhasilan PNPM Mandiri-KP ataupun program-program pengentasan kemiskinan yang lainnya, sudah saatnya kita menggunakan metode pelaporan hasil monitoring dan evaluasi dengan menggunakan pengukuran kuantitatif yaitu pengukuran yang dapat menunjukkan berapa persen pendapatan penduduk meningkat, dan berap persen jumlah nelayan/petani ikan miskin yang telah

menjadi tidak miskin lagi per kabupaten dan per provinsi.

Pengukuran dengan metode kuantitatif diharapkan dapat lebih mempertajam program-program pengentasan kemiskinan dan terutama untuk PNPM Mandiri-KP, yaitu pada saat evaluasi nanti, mungkin ada daerah-daerah yang perlu dikendorkan karena masyarakat nelayan/petani ikan sudah mandiri dan ada daerah-daerah yang masih perlu ditingkatkan berdasar dan mengambil pelajaran dari pelaksanaan program-program serupa didaerah lain yang berhasil.

Akhirnya, berbagai program dan kebijakan penannggulangan kemiskinan yang telah digagas oleh pemerintah, membutuhkan usaha yang serius untuk melaksanakan dan mengawasinya demi kesejahteraan masayarakat secara keseluruhan.

*Penulis adalah Staf Bidang P2HP Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. (dimuat pada Kolom “Opini” Radar Sulteng, 10 April 2009)
2011, SULAWESI TENGAH PROVINSI RUMPUT LAUT
Oleh : Dr. Ir. Hasanuddin Atjo, MP*

Salah satu obsesi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah di sektor Perikanan dan Kelautan adalah menjadikan provinsi ini sebagai Provinsi Rumput Laut pada tahun 2011. Obsesi ini merupakan salah satu konklusi pada seminar tunggal investasi pengembangan industri rumput laut Sulawesi Tengah oleh Gubernur H.B Paliuju yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juli 2008 di Hotel Aston Atrium Senen, difasilitasi oleh Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) Departemen Kelautan dan Perikanan RI. Seminar investasi tersebut dihadiri oleh Dirjen P2HP dan jajarannya, Bupati Parigi Moutong, Walikota Palu, SKPD terkait se Sulteng, Kadin Sulteng, Komisi Rumput Laut Indonesia serta investor dari dalam maupun luar negeri. Salah satu investor yang telah menyatakan minat seriusnya adalah PT Palu Palms Nusantara asal Malaysia yang telah membuat nota kesepahaman dengan Pemerintah Provinsi Sulteng pada tanggal 31 Juli 2008 di Kuala Lumpur.
Ada beberapa hal yang mendasari obsesi menjadi Provinsi rumput laut antara lain (1) memiliki potensi budidaya rumput laut seluas 106.000 Ha (urutan ke 3 setelah Papua dan Maluku), tingkat pemanfaatan baru 4 % namun telah memposisikan provinsi ini sebagai penghasil nomor 3 setelah NTB dan Sulsel dengan produksi pada tahun 2007 sebesar 17.000 ton kering, (2) Pasar masih terbuka luas karena manfaat rumput laut sebagai bahan pangan, bahan penunjang industri (farmasi, kosmetik, cat, kertas dan lain-lain) dan sumber energi biofull, (3) efektif sebagai instrument pemberdayaan dalam rangka pengurangan angka kemiskinan dan penyerapan tenaga kerja karena usia budidaya relatif singkat (45 hari), teknologi relatif mudah, investasi kecil, break event point hanya Rp 2.500 kg/kg kering terhadap harga jual saat ini mencapai Rp 13.000/ kg kering, (4) serta berperan dalam mereduksi emisi CO_2 kaitannya dengan Global Warming.

Provinsi Rumput Laut
Realitas menunjukkan bahwa pada satu sisi provinsi ini adalah penghasil bahan baku nomor 3, namun pada sisi lain tercatat tidak memiliki nilai eskpor karena rumput laut tersebut dikirim dalam bentuk raw material (bahan baku kering) ke Makassar, Surabaya dan Jakarta untuk selanjutnya diproses menjadi semi refine (setengah jadi) dan refine (tercatat ada 900 end product rumput laut) kemudian diekspor. Situasi seperti ini tentunya akan melemahkan daya saing provinsi ini karena tidak memperoleh nilai tambah.
Bila obsesi itu menjadi realitas yaitu sebagai provinsi rumput laut, maka ada beberapa implikasi yang akan muncul antara lain adalah menjadi salah satu produsen terbesar di Indonesia; berkembangnya industri hulu seperti pabrik bola pelampung untuk budidaya, flouting buoy; berkembangnya industri hilir seperti pabrik semi refine (chips dan powder) dan refine (end product). Posisi seperti ini tentunya akan mendorong daya saing daerah ini karena antara lain akan meningkatkan PDRB, Produk Domestic Regional Bruto, Pengurangan angka kemiskinan dan penyerapan tenaga kerja.
Berdasarkan Grand Strategy, maka pada tahun 2011 areal budidaya diproyeksikan seluas 28.000 Ha dengan sasaran produksi sebesar 140.000 ton kering dan penyerapan tenaga kerja secara agregat mencapai 84.000 Kepala keluarga.
Bila diasumsikan harga rumput laut dapat dipertahankan sebesar Rp 10.000/kg kering maka dana yang akan beredar di masyarakat mencapai 1,4 triliyun rupiah per tahun. Selanjutnya bila raw material tersebut diolah menjadi chips (potongan rumput laut) atau keraginan powder maka nilai tambah akan semakin besar. Sebagai informasi disampaikan harga chips per kg di pasaran Internasional antara 3 – 4 USD sedangkan keraginan mencapai 15 – 20 USD/kg.

Strategi Pengembangan
Strategi yang digunakan untuk merealisasikan Sulteng sebagai Provinsi rumput laut adalah melalui penerapan konsep Cluster yang memiliki legalitas formal berupa Pergub atau Perda di tiga zona pengembangan (Zona I : Cluster Selat Makassar dan Laut Sulawesi; Zona II Cluster Teluk Tomini; dan Zona III: Cluster Teluk Tolo). Dengan menerapkan konsep ini, maka di setiap Cluster akan berkembang Sistem Agribisnis yang terdiri dari sub sistem praproduksi (penyediaan pelampung dan tali), sub sistem produksi (penyediaan benih dan budidaya) dan sub sistem pascapanen (raw material , produk setengah jadi dan gudang). Selanjutnya Cluster akan diintegrasikan dengan Pusat Pertumbuhan Sulteng yaitu Kota Palu (Kawasan Industri Kota Palu) dan Kabupaten Luwuk (Kawasan Industri Luwuk). Di pusat pertumbuhan ini diharapkan akan berkembang industri penunjang (pabrik pelampung dan penunjangnya) dan industri keraginan (powder rumput laut).
Untuk mendorong berkembangnya cluster, maka paling tidak ada empat substansi yang akan menjadi fokus yaitu; (1)

Pengembangan infrastruktur dasar, (2) Pengembangan Teknologi dan SDM, (3) Pengembangan Kelembagaan Masyarakat, (4) dan Pengembangan Pasar. Selanjutnya untuk memobilisasi dan mengkoordinasikan inter dan antar cluster dengan pusat pertumbuhan Sulteng, maka akan digerakkan oleh Working Group atau POKJA tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Kemudahan Investasi

Merealisasikan Sulteng sebagai Provinsi rumput laut bagaimanapun juga akan dipengaruhi oleh jumlah investasi yang masuk ke wilayah ini, sehingga strategi yang harus ditempuh adalah memberikan insentif atau kemudahan berinvestasi bagi investor. Paling tidak ada 10 kemudahan berinvestasi yang telah dirilis oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah antara lain; (1) Jaminan keamanan dan kepastian hukum, (2) Lokasi usaha tersedia, (3) Pelayanan perizinan sistem satu atap (one roof service), (4) Biaya perizinan murah dan mudah, (5) Pajak usaha dipungut setelah perusahaan berproduksi komersial, (6) Jaminan hak guna usaha 30 tahun dan diupayakan menjadi 90 tahun oleh Pemerintah Daerah, (7) Tersedia Tenaga kerja lokal yang produktif, (8) Berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat agar bebas dari biaya impor mesin-mesin guna keperluan pabrik, (9) Berupaya menyiapkan fasilitas listrik dan fasilitas lainnya ke lokasi perusahaan, dan (10) Tersedianya Kawasan Industri Palu, Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (Kapet) Batui dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Dari uraian di atas dapat ditarik hubungan bahwa merealisasikan obsesi menjadi Provinsi rumput laut bukan pekerjaan mudah, namun paling tidak adanya kebijakan tentang konsep Cluster dan kemudahan berinvestasi akan menjadi pendorong. Semoga.

*Penulis adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah